

**ANALISIS KESENJANGAN DAERAH DAN KONVERGENSI PDRB
PERKAPITA KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR SEBELUM DAN SETELAH
DESENTRALISASI**

Yoza Ammita Elwana

Sutikno

Universitas Trunojoyo Madura

Widita Kurniasari

Universitas Trunojoyo Madura

Abstract

The purposes of this study are; to analyze regional disparities and the convergence before and after decentralization, determine the amount of speed of convergence that happen, and to discover the description of per capita income growth changing through Klassen typology.

This research is conducted by using quantitative data with: Indeks Williamson Analysis; a simple OLS regression analysis (Ordinary Least Square); and Topologi Klassen Analysis. Conclusions of this study are; (1) there are a convergence occur within speed convergence is 0,34 before the decentralization and convergence with a speed of convergence as 0,42 happened after the decentralization, (2) by dividing into 4 quadrant in Klassen typology measurement, the majority is in 4th quadrant where the District and City are remain left behind, and the movement of quadrant into 2nd quadrant is happened after the decentralization that means they belong to fast-growing region.

Keywords: Regional Disparities, Convergence, Decentralization

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi saja. Hal juga yang menjadi penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pemerataan pembangunan. Oleh sebab itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah indeks ketimpangan suatu daerah. Salah satu permasalahan perekonomian Indonesia sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah baik pemerintah pusat maupun

daerah adalah masalah kesenjangan ekonomi. Setidaknya ada tiga bentuk kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, yaitu pertama, kesenjangan antara wilayah timur Indonesia dengan wilayah barat Indonesia; kedua, kesenjangan antara pulau Jawa dengan luar pulau Jawa; ketiga, kesenjangan antara daerah pusat-pusat industri dengan daerah bukan pusat industri. Untuk mengatasi permasalahan kesenjangan tersebut, pemerintah sejak tahun 2001 memberlakukan UU Otonomi Daerah. UU tersebut fokus

pada dua aspek desentralisasi yaitu desentralisasi kewenangan dan keuangan (fiskal).

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl, 2000). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan keseimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah, melalui pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Artinya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah. Bahl (2000) mengemukakan dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan diantara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (*there must be a champion for fiscal decentralization*).

Esensi utama dari pengelolaan daerah secara otonom karena daerahlah yang memiliki kemampuan dalam mengetahui berbagai kebutuhan pembangunan serta potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang pembangunan regional. Ketimpangan antar daerah akan memberikan pengaruh yang kurang baik dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan antardaerah karena sebagai konsekuensi yang ditimbulkan. Untuk mengatasi masalah ketimpangan tersebut dilakukan dengan adanya proses pembangunan ekonomi nasional dan regional dalam jangka panjang untuk meningkatkan produksi riil atau pendapatan nasional riil per kapita yang terjadi secara terus menerus (*steady growth*). Adanya ketimpangan antar-

daerah yang satu dengan daerah lainnya berdampak pada ketidakseimbangan perputaran kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada ketimpangan kemakmuran masyarakat antardaerah yang bersangkutan.

Pemerintah lokal, dengan kemampuan masing-masing memiliki cara tersendiri untuk membuat daerahnya semakin tumbuh cepat. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari pendapatan perkapita tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur mengalami kenaikan PDRB Perkapita setiap tahunnya, bahkan dalam perbandingan kenaikan PDRB Perkapita sebelum dan setelah adanya otonomi daerah (OTODA).

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan analisis pada konvergensi pendapatan perkapita antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Penelitian ini membatasi diri pada masalah apakah wilayah-wilayah miskin di Jawa Timur mampu mengejar ketertinggalan wilayah kaya di Jawa Timur, dan membandingkan antara sebelum adanya desentralisasi fiskal dan setelahnya.

Pembagian wilayah menurut kemampuan yang dilihat melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, menurut Klassen akan memudahkan dalam mengetahui pemetaan menurut kemampuan wilayah tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Kondisi kesenjangan daerah di Jawa Timur
2. Tingkat konvergensi sebelum dan sesudah adanya desentralisasi fiskal di Jawa Timur dan seberapa besar *speed of convergence* yang dicapai?
3. Kondisi tipologi daerah setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebelum dan setelah desentralisasi?

LANDASAN TEORI

Teori dalam penelitian ini menggunakan empat *grand theory* dimana teori yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi, menurut boediono(1981) Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat, melainkan melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Kemudian teori kedua yaitu teori dasar konvergensi, penelitian ini menggunakan teori yang digunakan oleh barro and salai. Apabila seluruh perekonomian secara hakekat adalah sama, seandainya tidak ada besar kecilnya atau kuat tidaknya *starting capital*. Maka konvergensi bisa diaplikasikan dalam konvergensi. Kondisi perekonomian yang konvergen merupakan kesempatan daerah miskin untuk memacu pertumbuhan ekonominya sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari perekonomian daerah kaya.

Konvergensi- β menjelaskan bagaimana perekonomian wilayah miskin memiliki kecenderungan untuk tumbuh lebih cepat dari yang kaya. Dengan mendasarkan pada "*Barro Regression*", untuk mengukur tingkat konvergensi untuk data *cross sectional* digunakan pendekatan bentuk non-linear

$$\left(\frac{1}{T}\right) \cdot \log \left(\frac{y_{i,t+T}}{y_{i,t}} \right) = a - \left(\frac{1 - e^{-\beta T}}{T} \right) \log(y_{i,t}) + u_{i,t,t+T}$$

dimana i menunjukkan regional unit, t adalah awal tahun penelitian dan T adalah waktu akhir penelitian ($T-t$ adalah periode observasi), $u_{i,t,t+T}$ mempersentasikan rata-rata *error term* $u_{i,t}$ antara waktu t dan T . α adalah

intersep, y adalah output atau income perkapita, dan kemudian $-(1 - e^{-\beta T})/T$ adalah koefisien $\log(y_{i,t})$, β menunjukkan kecepatan konvergensi setiap tahunnya (*speed of convergence*).

Menurut Sala-i Martin, jika terdapat data GDP perkapita untuk *cross section* dari tiap ekonomi i maka dapat dijabarkan dalam bentuk $y_{i,t,t+T} \equiv \log(y_{i,t+T}/y_{i,t})/T$ menunjukkan suatu ekonomi i dengan tingkat pertumbuhan GDP tahunan antara t dan $t + T$ dan $\log(y_{i,t})$ adalah logaritma GDP perkapita suatu ekonomi i pada waktu t . Jika diestimasi mengikuti persamaan regresi maka bentuk persamaannya adalah :

$$y_{i,t} = a - b \log(y_{i,t}) + u_{i,t}$$

dimana $b = -(1 - e^{-\beta T})/T$

apabila $b < 0$ atau $0 < \beta < 1$ menunjukkan bahwa perekonomian wilayah miskin berkecenderungan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari perekonomian wilayah kaya dengan nilai β sebagai *rate of convergence*.

Konvergensi dikatakan terjadi jika daerah yang miskin tumbuh lebih cepat daripada daerah yang kaya sehingga hasilnya adalah tingkat pendapatan perkapita daerah miskin akan sama dengan daerah kaya. Secara empiris hal ini dilakukan dengan mengestimasi model ekonometrika dimana pendapatan awal periode sebagai satu-satunya variabel penjelas bagi pendapatan.

Teori ketiga mengenai konsep desentralisasi. Pada prinsipnya tujuan pelaksanaan desentralisasi adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik secara lebih efisien dari pemerintah daerah (*World Bank*, 2005) dengan jalan prinsip pemisahan kekuasaan dan pada prinsip berbagi kewenangan.

Kemudian yang terakhir yaitu konsep tipologi kawasan Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah

berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal.

Kemudian keterkaitan desentralisasi dan konvergensi sendiri yaitu Pembangunan regional daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilakukan oleh wilayah selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut, tujuan wilayah melakukan pembangunan perekonomian ialah untuk mengejar ketertinggalan dan menyesuaikan diri dengan wilayah-wilayah yang sudah maju baik dalam hal pendapatan, produktivitas, upah dan berbagai indikator ekonomi lainnya. Sehingga gap (jurang) kesenjangan antar wilayah tersebut akan berkurang. Dalam hal ini dikenal dengan istilah konvergensi antar wilayah (Saldanha, 1997).

METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mencatat teori-teori dari buku-buku literatur, bacaan-bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data-data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip dan juga termasuk buku-buku tertentu, pendapat, teori, atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen yang diperlukan adalah PDRB

kabupaten/kota Jawa Timur dan jumlah penduduk kabupaten/kota Jawa Timur.

Model yang digunakan dalam analisis penelitian ini yaitu model regresi Barro and Sala-i martin, dan dengan menggunakan model yang sama namun berbeda periode waktunya yaitu sebelum dan setelah desentralisasi. Adapun model untuk mengestimasi sebagai berikut :

Model Penelitian 1:

Pada model ini menghubungkan tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebelum desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut: $\left(\frac{1}{T}\right) \cdot \log\left(\frac{y_{i,t+T}}{y_{i,t}}\right) = a - \left(\frac{1-e^{-\beta T}}{T}\right) \cdot \log(y_{i,t}) + u_{i,t,t+T}$ dimana i menunjukkan *region*, a adalah intercept, $\left(\frac{y_{i,t+T}}{y_{i,t}}\right)$ adalah tingkat pertumbuhan perkapita, serta $u_{i,t,t+T}$ adalah *average error term*.

Persamaan 3.1 diasumsikan digunakan untuk mengestimasi konvergensi pada periode sebelum adanya desentralisasi fiskal. Untuk mendukung hipotesis konvergensi akan di cari hasil β konvergensi, dengan mengestimasi model :

$$b = - \left(\frac{1 - e^{-\beta \cdot T}}{T} \right)$$

Untuk nilai b , didapat dengan melalui penghitungan OLS dari tahun 1990-2001 (sebelum desentralisasi), dan persamaan 3.2 akan mengetahui besarnya *speed of convergence* yang terjadi di Jawa Timur sebelum adanya desentralisasi.

Model Penelitian 2:

Untuk model analisis kedua, yaitu sama menggunakan regresi model Barro and Sala-i martin, model untuk mengestimasi konvergensi dalam

pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur setelah adanya desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

$$\left(\frac{1}{T}\right) \cdot \log \left(\frac{y_{i,t+T}}{y_{i,t}} \right) = a - \left(\frac{1 - e^{-\beta T}}{T} \right) \cdot \log(y_{i,t}) + u_{i,t,t+T}$$

Persamaan tersebut digunakan untuk mengestimasi β konvergensi pada periode setelah adanya desentralisasi fiskal. Dan untuk mendukung hipotesis konvergensi, dengan mengestimasi model:

$$b = - \left(\frac{1 - e^{-\beta \cdot T}}{T} \right)$$

dimana, nilai b didapat dengan penghitungan regresi OLS dari tahun 2002-2010. Persamaan ini digunakan untuk mengetahui besarnya *speed of convergence* yang terjadi setelah adanya desentralisasi.

Model Penelitian 3:

Untuk menganalisis pergeseran tiap-tiap wilayah, model ini menggunakan analisa tipologi wilayah menurut Klassen, berikut matriks tipologi Klassen:

	$Y_i > y$	$Y_i < y$
$R_i > r$	Daerah maju dan tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat
$R_i < r$	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Dimana:

- R_i = Laju pertumbuhan PDRB di wilayah i
- Y_i = Pendapatan perkapita wilayah i
- R = Laju pertumbuhan PDRB
- Y = Pendapatan perkapita rata-rata

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kesenjangan Wilayah Jawa Timur

Salah satu indikator yang bisa membaca seberapa jauh tingkat kesenjangan/disparitas antar wilayah yaitu Indeks Williamson. Semakin besar angka yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson berarti semakin melebar kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil indeks ini, semakin mengecil kesenjangan antar wilayahnya.

Pencapaian Indeks Williamson di Jawa Timur pada empat tahun terakhir relatif berfluktuatif, tetapi ada kecenderungan semakin membaik dalam kurun dua tahun terakhir. Berikut ini gambaran tingkat kesenjangan daerah di Jawa Timur dalam empat tahun terakhir.

Tabel 1. Indeks Williamson Jawa Timur Tahun 2009-2012

Tahun	Indeks Williamson	Perubahan
(1)	(2)	(3)
2009	114,46	0,46520
2010	115,14	0,59409
2011*	112,68	-2,13653
2012**	112,60	-0,07100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan: *) Angka diperbaiki

**) Angka Sementara

Pada tahun 2009 indeks ini tercatat sebesar 114,46 selanjutnya melebar pada tahun 2010. Selanjutnya indeks ini semakin mengecil pada tahun 2011 dan 2012 yang pencapaiannya masing-masing 112,68 dan 112,60. Berkurangnya kesenjangan dalam dua tahun terakhir tidak lepas dari semakin baiknya infrastruktur yang tersedia di daerah tertinggal selama ini. Termasuk salah satunya adanya jembatan Suramadu yang bisa

meningkatkan arus perekonomian dan transfer sosial budaya kewilayah Madura semakin cepat.

Selain jembatan Suramadu, infrastruktur fenomenal lainnya yang dibangun pemerintah daerah Jawa Timur adalah Jalur Lintas Selatan (JLS). Jalur ini sangat mendukung perekonomian pada wilayah selatan yang sebelumnya masih menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Konvergensi sebelum desentralisasi

Pada analisis data penelitian ini, model analisis regresi *barro and sala-i martin*, menjadi acuan serta referensi penelitian sebelumnya. Namun, sebelumnya untuk mengetahui nilai b dalam estimasi model yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya, penelitian ini menggunakan selisih antara *average*(rata-rata) dari pendapatan perkapita Kabupaten/Kota se Jawa Timur dalam periode waktu 11 tahun (sebelum desentralisasi) dengan rata-rata nilai wilayah Kota Surabaya (NUM/numeralisasi) sebagai variabel *dependent* (tergantung), variabel *independent* (bebas) menggunakan pendapatan awal periode tahun penelitian.

Tabel 2. Hasil Analisis Data *Section* Pra Desentralisasi (1990-2001)

Variabel	Coefficient	Std. error	t-stat	Prob
Constan	5145	101419	50.7	0.00
$\pi_{i,t0}$	-4.28	0.12	-34.0	0.00
r-squared	0.97			

Sumber: Eviews 3.0, diolah.

Tabel 3. Rate of convergence

coefficient b	Nilai β convergence
- 4.28	0.34

Nilai koefisien determinasi (R^2) untuk regresi konvergensi pada tahun 1990-2001 (sebelum desentralisasi) sebesar 0.972201. Hal ini menunjukkan kemampuan model regresi menerangkan variasi variabel endogen sebesar 97 persen. Artinya variabel pendapatan perkapita di awal tahun penelitian sebagai variabel bebas memberikan hampir semua informasi untuk memprediksi tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita sebagai variasi variabel tak bebas.

Nilai koefisien parameter b untuk persamaan konvergensi merupakan koefisien parameter dari pendapatan perkapita yang besarnya -4.28. Maka dapat diketahui nilai β sebesar 0.34. Dengan nilai koefisien parameter $b < 0$ dan $0 > \beta < 1$ maka menunjukkan pertumbuhan pendapatan perkapita di Jawa Timur terjadi konvergensi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten/Kota yang mempunyai pendapatan perkapita awal yang rendah pada pra desentralisasi mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan daerah yang lebih kaya dengan adanya perbedaan karakteristik perekonomian.

Dan pada hipotesis ini dengan melihat nilai t -hitung sebesar $-34.98 <$ nilai t -tabel 1,697. Artinya pendapatan pada awal periode berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap rata-rata pertumbuhan perkapita pada periode sebelum desentralisasi.

Konvergensi setelah desentralisasi

Analisis setelah desentralisasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Data *Section* Era Desentralisasi (2002-2010)

Sumber : Eviews 3.0, diolah.

Coefficient b	Nilai β <i>convergence</i>
-3.74	0.42

Sumber: data diolah.

Nilai koefisien determinasi (R^2) untuk regresi konvergensi pada tahun 2002-2010 (setelah desentralisasi) sebesar 0.978234. Hal ini menerangkan variasi variabel endogen sebesar 97 persen. Artinya variabel pendapatan perkapita di awal tahun penelitian sebagai variabel bebas memberikan hampir semua informasi untuk memprediksi tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita sebagai variasi variabel tak bebas.

Nilai koefisien parameter b untuk persamaan konvergensi merupakan koefisien parameter dari pendapatan perkapita yang besarnya -3.74. Maka dapat diketahui nilai β sebesar 0.42. Dengan nilai koefisien parameter $b < 0$ dan $0 < \beta < 1$ maka menunjukkan pertumbuhan pendapatan perkapita di Jawa Timur terjadi konvergensi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten/ Kota yang mempunyai pendapatan perkapita awal yang rendah pada pra desentralisasi mempunyai pertumbuhan pendapatan perkapita yang tinggi dibandingkan daerah yang lebih kaya dengan adanya perbedaan karakteristik perekonomian.

Pada periode setelah adanya desentralisasi fiskal, nilai t-hitung tidak

jauh besarnya yaitu $-39.66 < \text{nilai } t\text{-tabel } 1,697$. Artinya pendapatan awal periode juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap rata-rata pertumbuhan pendapatan perkapita.

Dari analisa data inilah, terlihat bahwa pada periode tahun 1990-2001 (sebelum desentralisasi) telah terjadi konvergensi artinya pada wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang tingkat pendapatan perkapitanya rendah mampu mengejar ketertinggalan pada wilayah Kabupaten/Kota yang tingkat pendapatan perkapitanya tinggi. Untuk daerah acuan, wilayah Kabupaten/Kota diukur dengan melihat tingkat pertumbuhan pada Kota Surabaya sebagai ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pada periode tahun 2002-2010 terlihat bahwa juga terjadi konvergensi pendapatan perkapita, namun pada *rate of convergencenya* angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan pra desentralisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengejar ketertinggalan lebih besar namun berarti bahwa nilai yang semakin besar tersebut akan memperlambat laju konvergensi dari periode sebelum desentralisasi.

Tipologi sebelum desentralisasi

Setelah menganalisis konvergensi daerah kabupaten/ kota yang ada di Jawa Timur, maka selanjutnya akan dianalisis tipologi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Timur sebelum dan setelah desentralisasi. Berikut ini hasil analisis tipologi Klassen sebelum desentralisasi

Tabel 6. Hasil Tipologi Klassen Sebelum Desentralisasi (1990-2001)

	$Y_i > y$	$Y_i < y$
$R_i > r$	Sidoarjo, Gresik, Kt Kediri, Kt Surabaya	Kab.Kediri, Mojokerto, Tuban, Blitar
$R_i < r$	Kt Malang, Kt Probolinggo, Kt Mojokerto	Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kt Pasuruan, Kt Madiun

Tipologi setelah desentralisasi

terlihat pada tabel berikut ini.

Sedangkan hasil analisis tipologi Klassen setelah desentralisasi dapat

Tabel 7. Hasil Tipologi Klassen Setelah Desentralisasi (2002-2010)

	$Y_i > y$	$Y_i < y$
$R_i > r$	Sidoarjo, Kt Kediri, Kt Malang. Kt Surabaya	Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Mojokerto, Jombang, Ngajuk, Madiun, Magetan, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sumenep, Kt Batu
$R_i < r$	Kt Gresik, Kt Probolinggo, Kt Mojokerto	Pacitan, Ponorogo, Kediri, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Ngawi, Tuban, Sampang, Pamekasan, Kt Blitar, Kt Pasuruan, Kt Madiun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil regresi dari estimasi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS), sebelumnya. Nilai koefisien yang terjadi pada sebelum desentralisasi bernilai negatif, dan pada era desentralisasi pun juga demikian, namun nilainya berbeda. Untuk *speed of convergence* memang terjadi perbedaan pada periode keduanya, hasilnya lebih besar pada periode tahun 2002-2010 pada era desentralisasi.

Hubungan negatif pada variabel yang digunakan pada penelitian ini berarti Kabupaten/Kota yang memiliki pendapatan per kapita yang kecil akan mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita yang cenderung tumbuh lebih cepat dibanding Kabupaten/Kota yang memiliki pendapatan per kapita yang besar dengan memperhatikan perbedaan karakteristik. Hal ini terbukti hipotesis mengejar ketertinggalan sesuai dengan penelitian Barro dan Sala-i-Martin yang menyimpulkan bahwa wilayah dengan pendapatan per kapita yang rendah mampu tumbuh lebih cepat daripada wilayah yang berpendapatan per kapita yang tinggi.

Pada penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah pertama, yaitu memang terjadi konvergensi pada tahun 1990-2001 di Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan besarnya yaitu 0,34. Kedua, setelah adanya desentralisasi pada tahun 2002-2010 juga terjadi konvergensi pada setiap wilayah se Jawa Timur dengan kecepatan sebesar 0,42. Angka *speed convergence* yang semakin besar berarti bahwa setelah desentralisasi akan memperlambat laju konvergensi. Ketiga, pembagian wilayah sebelum adanya desentralisasi ini menurut tipologi Klassen terdapat 4 Kabupaten/Kota dimana wilayah tersebut berkembang cepat, dan yang terakhir pada kuadran 1 yaitu daerah cepat maju dan tumbuh diisi oleh 4

Kabupaten/Kota termasuk ibukota Provinsi Jawa Timur sendiri yaitu Kota Surabaya. Keempat, menurut pembagian wilayah tipologi Klassen juga mengalami pergeseran, atau bahkan konvergensi juga terlihat di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dengan menghitung PDRB per kapita dan pertumbuhan PDRB konstan yang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, hasilnya adalah pada kuadran 4 dimana wilayah tersebut merupakan wilayah relatif tertinggal, hanya ditempati oleh 13 Kabupaten/Kota saja yang semula berjumlah 26 Kabupaten/Kota pada sebelum adanya desentralisasi. Sedangkan, pada kuadran 3, dimana wilayah ini merupakan wilayah maju tertekan terdapat 3 Kota saja, di kuadran 2 pada wilayah berkembang sedang terdapat 18 Kabupaten/Kota. Dalam kuadran inilah yang terjadi perubahan yang signifikan, dibanding dengan tahun 1990an yang hanya terdapat 4 kabupaten/Kota saja. Sedangkan pada kuadran tertinggi yaitu kuadran 1, masih terlihat bahwa Kota Surabaya tetap berada pada kuadran ini sebagai pusat kegiatan perekonomian terbesar di Jawa Timur, dan disusul dengan Kota Kediri, Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dengan mengukur dari rata-rata pertumbuhan PDRB konstan dengan PDRB per kapita adalah banyak sekali bahkan mayoritas Kabupaten/Kota yang berada pada kuadran 4 dimana wilayah tersebut tertinggal dari daerah lainnya, sebanyak 26 Kabupaten/Kota masuk dalam wilayah tersebut, sedangkan pada kuadran 3 dimana wilayah tersebut maju tertekan terdapat 3 Kota, sedangkan di kuadran 2 terdapat 4 Kabupaten/Kota dimana wilayah tersebut berkembang cepat, dan yang terakhir pada kuadran 1 yaitu daerah cepat maju dan tumbuh diisi oleh 4 Kabupaten/Kota termasuk ibukota

Provinsi Jawa Timur sendiri yaitu Kota Surabaya. Keempat, menurut pembagian wilayah tipologi Klassen juga mengalami pergeseran, atau bahkan konvergensi juga terlihat di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dengan menghitung PDRB per kapita dan pertumbuhan PDRB konstan yang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, hasilnya adalah pada kuadran 4 dimana wilayah tersebut merupakan wilayah relatif tertinggal, hanya ditempati oleh 13 Kabupaten/Kota saja yang semula berjumlah 26 Kabupaten/Kota pada sebelum adanya desentralisasi. Sedangkan, pada kuadran 3, dimana wilayah ini merupakan wilayah maju tertekan terdapat 3 Kota saja, di kuadran 2 pada wilayah berkembang sedang terdapat 18 Kabupaten/Kota. Dalam kuadran inilah yang terjadi perubahan yang signifikan, dibanding dengan tahun 1990an yang hanya terdapat 4 kabupaten/Kota saja. Sedangkan pada kuadran tertinggi yaitu kuadran 1, masih terlihat bahwa Kota Surabaya tetap berada pada kuadran ini sebagai pusat kegiatan perekonomian terbesar di Jawa Timur, dan disusul dengan Kota Kediri, Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi ketimpangan daerah berdasarkan angka Indeks Williamson di Jawa Timur pada empat tahun terakhir relatif berfluktuatif, tetapi ada kecenderungan semakin membaik dalam kurun dua tahun terakhir.
2. Sebelum desentralisasi di Kabupaten/Kota Jawa Timur terjadi konvergensi dengan *speed of convergence* sebesar 0,34.

3. Setelah desentralisasi di kabupaten/kota Jawa Timur juga telah terjadi konvergensi dengan *speed of convergence* sebesar 0,42.
4. Dengan penghitungan tipologi Klassen dengan membagi menjadi empat kuadran, maka sebelum otonomi daerah mayoritas berada pada kuadran 4, dimana 26 kabupaten/kota berada di daerah yang relatif tertinggal diantaranya kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Pasuruan, dan Kota Madiun. Pada kuadran 3 untuk daerah maju tertekan, terdapat Kota Malang, Kota Probolinggo dan Kota Mojokerto. Kuadran 2 terdapat Kab.Kediri, Mojokerto, Tuban, Blitar yaitu daerah berkembang cepat.
5. Sedangkan daerah maju dan tumbuh cepat di kuadran 1 terdapat Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Kota Kediri, dan Kota Surabaya. Sedangkan penghitungan setelah otonomi daerah menurut penghitungan tipologi Klassen diperoleh hasil yaitu pada kuadran 4 yang semula mayoritas Kabupaten/Kota berada di daerah relatif tertinggal bergeser pada kuadran 2 yaitu daerah berkembang cepat, sedangkan pada kuadran 1 masih terdapat kota Surabaya di daerah maju dan tumbuh cepat.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi serta pengawasan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap

- pemerintah di setiap kabupaten/kota dengan memantau perkembangan perekonomian yang semakin tumbuh dengan cepat. Misalnya dengan mengadakan kegiatan yang berisikan tentang kearifan lokal yang dimiliki setiap wilayah, agar nantinya dapat menarik para investor untuk berinvestasi demi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
2. Bagi pemerintah daerah dengan potensi yang dimiliki harusnya lebih kreatif dan inovatif demi memperkaya serta mempertahankan karakteristik yang dimilikinya. Karena kemajuan wilayah/daerah hanya daerah tersebut yang lebih mengetahui demi mewujudkan suatu kesejahteraan rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. STIE YKPN
- Abramovitz, Moses. 1986. Catching Up, Forging Ahead and Falling Behind, *Journal of Economic History*, Juni 1986:385-406
- Barro, Robert J & Xavier Sala-i-Martin. 2004. *Economic Growth*. Edisi Kedua
- Blancard, Oliver J. 2009. *Macroeconomics*. Fifth Edition. Upper-Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. Inc
- Boediono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Gujarati Damodar N. 2003. *Basic Econometrics International Edition*. New York: Mc Graw-Hill Companies. Inc
- Hafizrianda, Yundy. Tanpa Tahun. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Perkembangan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga

- Le Gallo J dan Dall Erba. 2003. *Spatial Econometrics Analysis of The European Regional Convergence Process: Journal of economics literature*. France
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Macroeconomics*. Fifth Edition. Worth Publishers New York
- Saldanha, Joao M. 1997. *Growth and Convergence in INDONESIA*. Manuscript, Department of Economics, Harvard University.
- Sodik Jamzani. 2006. *Pertumbuhan Ekonomi Regional: Suatu Analisis Konvergensi dan Propinsi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*
- World Bank. 1998. *Economic policy*. *Journal of Economic Literature*
- Warta Anggaran, 2006. *Kapita Selekt*